



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Laporan Tahunan

Informasi Publik PPID BPPSDMP

Kementerian Pertanian Tahun 2021



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

bppsdp.pertanian.go.id [@bppsdp](#) [badansdm](#) bppsdp@pertanian.go.id [bppsdp kementan ri](#) [badansdm](#)

**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**



<http://bppsdp.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I BPPSDMP kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2021 ini menyajikan data laporan pemohon informasi, waktu pelayanan, sekilas PPID BPPSDMP yang berupa program, motto, maklumat, SDM, anggaran, prasarana dan sarana, serta inovasi dan kolaborasi layanan informasi yang dilaksanakan lingkup BPPSDMP yang dikemas dalam bentuk informatif sehingga mudah dipahami dan dibaca.

Tahun 2021 menjadi kebanggaan PPID BPPSDMP, dimana BPPSDMP meraih 4 (empat) penghargaan dan peringkat dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini menjadi motivasi dan menambah semangat untuk PPID BPPSDMP dalam memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2021 masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2021 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Atasan PPID Pelaksana Eselon I
Kepala Badan PPSDMP,

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I LATAR BELAKANG.....	1
II STRUKTUR PPID LINGKUP BPPSDMP.....	2
1. Sekilas PPID Unit Kerja.....	2
2. Motto dan Maklumat Layanan PPID	3
3. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	3
4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran PPID	5
5. Sarana dan Prasana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	6
6. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi.....	6
III PELAKSANAAN PPID LINGKUP BPPSDMP	8
7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi	8
8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	9
9. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak dan Alasan Penolakan.....	9
10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	10
11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	10
12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi.....	11
IV PENUTUP	14
LAMPIRAN.....	

I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggaraan negara dalam hal ini Pusat dan Masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.

Salah satu hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersifat terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Kementerian Pertanian selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintah

yang terbuka/transparan sekaligus sebagai langkah strategi mencegah upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan demikian, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) selaku Unit Eselon I dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian berkomitmen untuk turut mendukung keterbukaan informasi publik. Komitmen ini tertuang dalam Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMP oleh Pejabat Eselon I dan II serta Kepala UPT di lingkup BPPSDMP.

Selain itu, dukungan BPPSDMP juga diwujudkan dalam bentuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana baik di tingkat Pusat maupun UPT yang didukung dengan anggaran serta dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya.



II. SEKILAS PPID LINGKUP BPPSDMP

1. Gambaran PPID BPPSDMP

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Permentan tersebut menguraikan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang selanjutnya pada tahun 2016 disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi dan informasi agar proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal di lingkup unit kerjanya.

Pengumpulan dan penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Dari mulai unit kerja Eselon II di Pusat hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berjumlah 20 UPT tersebar di Indonesia. Koordinasi dilakukan baik dalam bentuk rapat/pertemuan dan diskusi baik secara *offline* maupun *online*, pembinaan, pengawalan dan pendampingan, serta *workshop* secara *hybrid*.

Sementara itu, pengumpulan bahan dokumen seperti Daftar Informasi Publik (DIP) dikoordinir melalui PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Unit BPPSDMP. Pengumpulan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan PPSDMP yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pustakawan, Arsiparis dan Fungsional umum serta Koordinator dan Sub Koordinator yang berwenang dalam pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan dokumen terkait. Komunikasi dilakukan melalui sarana media sosial (*Whatsapp Group/WAG*) dan secara langsung baik tatap muka maupun *telephone*.

Eselon I BPPSDMP, berlokasi di Gedung D lantai 7 kantor Pusat Kementerian Pertanian. Secara khusus terkait teknis memiliki jajaran PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Unit Eselon II UPT berada di bawah BPPSDMP. Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/Badan Publik yang datang baik secara langsung maupun melalui portal PPID dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

Setiap data dan informasi yang tersedia dan dimiliki oleh BPPSDMP baik yang terkait dengan tugas dan fungsi BPPSDMP, maupun data dan informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan publik didokumentasikan dengan baik dan sistematis. Penyimpanan data dan informasi tersebut berupa hardcopy/tercetak, elektronik, video, foto dan audiovisual melalui aplikasi SIDADO dan *Website*. Data dan informasi tersebut juga disebarluaskan melalui media sosial akun resmi BPPSDMP.

Penyebaran dan pengelolaan media sosial BPPSDMP dilaksanakan secara profesional dan perkembangan informasi terkini sesuai dengan isu terkini dari media sosial Kementerian pertanian. Karena dengan memanfaatkan media sosial ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Adapun akun media sosial BPPSDMP dapat diakses melalui :

- Facebook : <https://www.facebook.com/bppsdpmp>
- Instagram : <https://www.instagram.com/bppsdpmp>
- Twitter : <https://www.twitter.com/badansdm>
- Youtube : <https://youtube.com/bppsdpmpkementanr>

2. Motto dan Maklumat Layanan PPID



Motto : 1. Cepat
2. Mudah
3. Akurat
4. Berkualitas



Maklumat :

“Kami siap memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.”

3. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Dalam pelaksanaan dan Implementasi Pelayanan Informasi di lingkup BPPSDMP terus berkoordinasi dengan PPID Utama selaku Koordinator pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Pertanian. Setiap tahun PPID BPPSDMP memiliki program dan rencana kegiatan

pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- a. Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK).
- b. Penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup kantor Pusat yang kemudian diikuti oleh seluruh Pimpinan Kepala UPT lingkup BPPSDMP.
- c. Pelaksanaan *Workshop* dan Bimbingan Teknis bagi PPID Pelaksana dan Pembantu pelaksana serta Petugas Pengelola Layanan Informasi Publik lingkup BPPSDMP.
- d. Pengawasan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik UPT serta Pra Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.
- e. Peningkatan anggaran mendukung keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDMP.
- f. Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan *website* BPPSDMP.
- g. Pengembangan sarana dan prasarana ruang layanan informasi publik.
- h. Updating data dan dokumen baik melalui layanan SIDADO, *website* dan Portal PPID BPPSDMP sesuai dengan SOP yang ditentukan.
- i. Evaluasi triwulanan PPID lingkup BPPSDMP.

Adapun kegiatan PPID BPPSDMP yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 antara lain:

- a. Rapat Koordinasi yang dilakukan secara rutin:
 - 1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Digitalisasi Informasi Lingkup BPPSDMP Tahun 2021 pada 20 Januari 2021.
 - 2) Rapat Koordinasi Atasan PPID, PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi Publik Lingkup Pusat BPPSDMP pada 1 Februari 2021.
 - 3) Workshop Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bagi Petugas Layanan pada 18 Februari 2021.
 - 4) Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Lingkup Pusat pada 18 Maret 2021.
 - 5) Workshop singkat Penyusunan Daftar Informasi Publik Lingkup Pusat pada 19 Maret 2021.
 - 6) Rapat Koordinasi PPID Pusat dan UPT pada 27 April 2021.
 - 7) Rapat Koordinasi Evaluasi Dokumen Portal PPID dan *Website* pada 7 Mei 2021.
 - 8) Rapat Koordinasi Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan pada 21 Juni 2021.

- 9) Rapat Koordinasi Persiapan Wawancara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan pada 16 Agustus 2021.
- a. Layanan tanggapan atas permohonan informasi publik didokumentasikan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan PPID BPPSDMP.
- b. Penandatanganan Komitmen oleh Kepala Badan PPSDMP, Sekretaris Badan PPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Bagian Umum, Koordinator lingkup Sekretariat Badan PPSDMP dan disaksikan oleh Komisioner Informasi Pusat dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada 14 Juni 2021.
- c. Evaluasi dan monitoring melalui laporan berkala Satuan Kerja PPID Pelaksana Eselon I dan UPT Ligkup BPPSDMP.
- d. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi lingkup Kementerian Pertanian tahun 2021.
- e. Dalam moment ini BPPSDMP meraih prestasi empat (4) prestasi dalam cakupan 5 besar, yaitu:
 - 1) **Peringkat I** Komitmen Pimpinan untuk Unit Kerja Eselon I.
 - 2) **Peringkat II** Keterbukaan Informasi Publik untuk unit kerja eselon I dengan predikat "**Informatif**".
 - 3) **Peringkat III** Keterbukaan Informasi Publik untuk unit kerja eselon II BBPP ketindan dengan predikat "**Informatif**".
 - 4) **Peringkat IV** Keterbukaan Informasi Publik untuk unit kerja eselon II PPMKP Ciawi dengan predikat "**Informatif**".

4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran PPID

- a. Sumber Daya Manusia
SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi. Dukungan dari aspek SDM antara lain dengan disusunnya struktur PPID lingkup BPPSDMP, jadwal penugasan harian Petugas Layanan Informasi Publik dan peningkatan kompetensi petugas dan pengelola layanan informasi publik, baik pusat maupun UPT lingkup BPPSDMP melalui *Workshop/Pelatihan*.
- b. Anggaran
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 unit Kerja BPPSDMP. Anggaran yang

disiapkan BPPSDMP dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, sebagai berikut:

- 1) Publikasi pemberitaan melalui media *online* dan cetak (Rp 2.537.864.000,-).
- 2) Pengembangan *Website* dan *Digital Library* (Rp 309.936.000,-).
- 3) Penderasan informasi melalui media sosial (Rp 172.000.000,-).
- 4) *Workshop* dan Pembinaan PPID (Rp 145.200.000,-)
- 5) Pengembangan Aplikasi Informasi yang dapat diakses oleh Publik (Rp 2.461.250.000,-).
- 6) Prasarana dan Sarana Ruang Layanan Informasi (Rp 200.000.000,-).

Diharapkan dengan adanya anggaran tersebut, penerapan pengelolaan layanan informasi publik dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan baik.

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang diterima BPPSDMP akan dilayani sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik Kementerian Pertanian. Untuk melayani permohonan informasi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan atas layanan yang diberikan.

Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup BPPSDMP :

- a. Ruang Layanan Informasi Publik yang dalam tahun 2021 ini telah di renovasi.
- b. Meja Layanan Informasi Publik.
- c. Ruang perpustakaan yang terintegrasi dengan ruang PPID.
- d. Kelengkapan Perangkat IT.
- e. *Website* Badan Publik yang memuat Daftar Informasi Publik pada tahun 2020 telah dilakukan pengembangan.
- f. Kelengkapan dokumen di Ruang Layanan, Portal PPID, dan *Website* BPPSDMP.

6. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Dari waktu ke waktu BPPSDMP terus membenahi dan melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk

memudahkan masyarakat mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan. Layanan informasi diberikan melalui dua layanan permohonan informasi melalui portal PPID dan website BPPSDMP.

Di masa pandemi ini terdapat beberapa terobosan inovasi layanan yang diberikan baik di bidang pelatihan, pendidikan maupun pelatihan pertanian, antara lain :

- a. Pelatihan dan sharing informasi seputar pertanian secara daring via platform zoom yaitu Bertani On Cloud (Selasa dan Kamis), Mentan Sapa Petani dan Penyuluh/MSPP (Jum'at), Ngobrol Asyik Penyuluhan/Ngobras (Selasa), dan Millenial Agriculture Forum/MAF (Sabtu);
- b. Bistan (Bincang Asyik Seputar Pertanian) : kegiatan *talkshow* seputar pertanian dengan menghadirkan penyuluh, petani milenial, dan tokoh pertanian lainnya yang disiarkan melalui chanel Youtube BPPSDMP;
- c. Aplikasi Pendaftaran Pelatihan Secara online untuk pelatihan sejuta petani;
- d. E-learning : metode pembelajaran pelatihan secara online;
- e. SIPEPSI : Sistem pelayanan pelatihan yang terintegrasi;
- f. E-VTC : dikembangkan oleh BBPP Ketindan, E-VTC ini memanfaatkan *google site* sebagai rumah utama dalam proses pembelajaran yang sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan para penyuluh pertanian dan petani;
- g. JuruTani : dikembangkan oleh Polbangtan YoMa yang merupakan aplikasi penyuluhan dan konsultasi baik dari petani kepada penyuluh, petani kepada pakar dan penyuluh kepada pakar sesuai dengan spesifikasi bidang keahlian dalam bidang pertanian;
- h. SIATO : dikembangkan oleh Polbangtan YoMa merupakan *platform* digital pelayanan akademik digunakan untuk menyampaikan pengumuman terkait dengan kegiatan akademik;

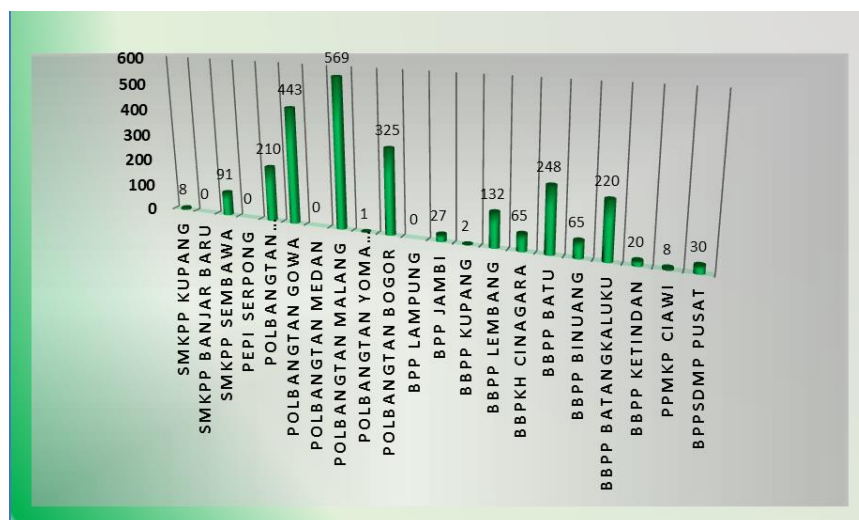
Selain aplikasi, masyarakat juga bisa mengakses secara langsung publikasi berupa berita, infografis dan informasi lain ke dalam media sosial.

III. PELAKSANAAN PPID LINGKUP BPPSDMP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) merupakan Badan Publik yang mempunyai 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari UPT Pelatihan (Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP)) serta UPT Pendidikan (Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN), Politeknik Engineering Pertanian Indonesia (PEPI) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK PPN)) yang tersebar di wilayah Indonesia. Salah satu tugas dari badan publik diantaranya menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

Pada Tahun 2021, PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Unit BPPSDMP telah menerima 2464 permohonan informasi dengan 2482 pertanyaan yang didominasi pertanyaan/informasi terkait agribisnis (1.671 kasus). Berdasarkan data pemohon yang tercatat menunjukkan rata-rata pemohon berusia 31-41 tahun dan mayoritas berprofesi sebagai karyawan swasta. Pertanyaan yang masuk pada umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1-2 hari. Adapun rincian permohonan informasi lebih lengkap sebagai berikut :

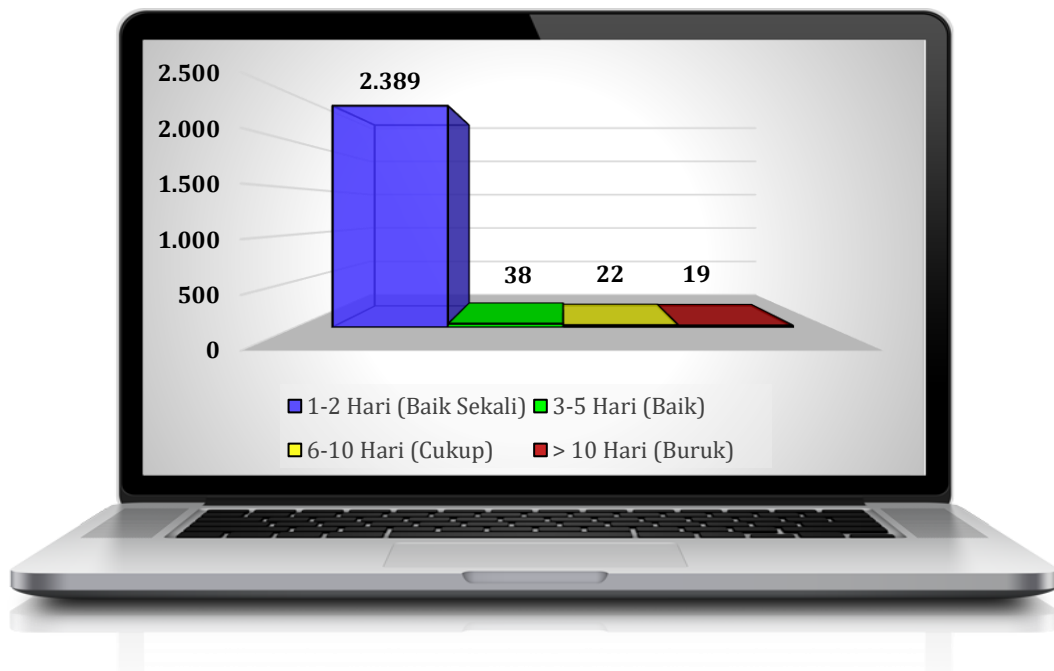
1. Rekapitulasi Permohonan



Gambar 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pemohon informasi kepada BPPSDMP Pusat dan UPT sebanyak 2.464 orang. UPT yang paling banyak mendapatkan permohonan informasi yaitu Polbangtan Malang sebanyak 569 orang (23,1%), sedangkan UPT yang tidak mendapatkan permohonan informasi yaitu SMK PPN Banjarbaru, Polbangtan Medan dan BPP Lampung.

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan panduan pelaksanaan pelayanan informasi publik, berdasarkan waktu respon pelayanan informasi terdapat beberapa kategori, yaitu: (a) 1-2 hari (baik sekali), 3-5 hari (baik), 6-10 hari (cukup), 11-17 hari (buruk) dan > 17 hari (buruk sekali). Grafik di atas menunjukkan bahwa rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik bagi UPT lingkup BPPSDMP dapat diselesaikan dalam kurun waktu **1-2 hari (Baik Sekali)** dengan 2.389 pertanyaan/kasus. Hal ini membuktikan bahwa pengelola PPID lingkup UPT BPPSDMP memberikan respon yang sangat cepat kepada masyarakat/pemohon.

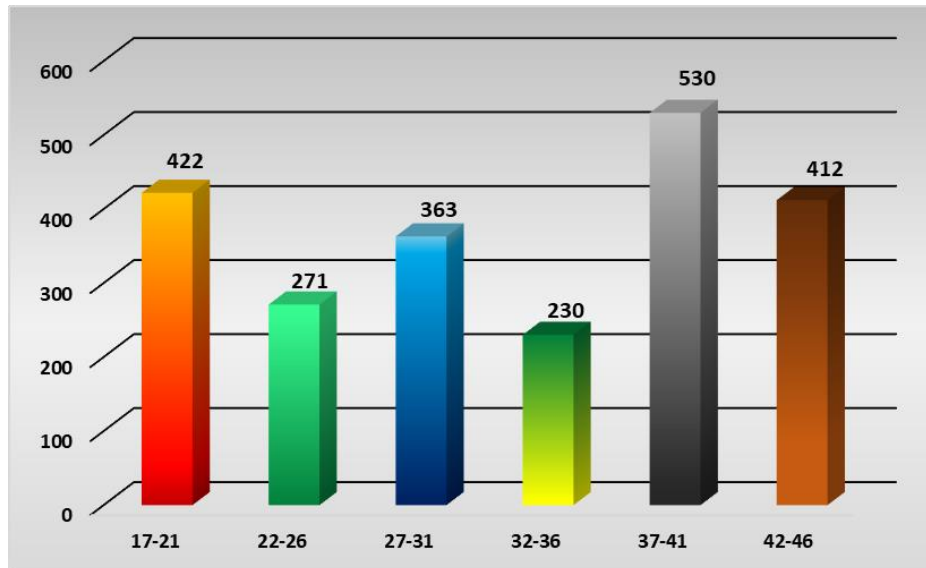
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan (NIHIL)

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak ada pelayanan keberatan dan alasan keberatan dari masyarakat (nihil). Hal tersebut menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh pengelola PPID lingkup UPT BPPSDMP dapat diterima dengan baik oleh masyarakat/pemohon.

4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan (NIHIL)

Berdasarkan laporan bahwa tidak ada permohonan yang ditolak oleh pengelola PPID lingkup UPT BPPSDMP.

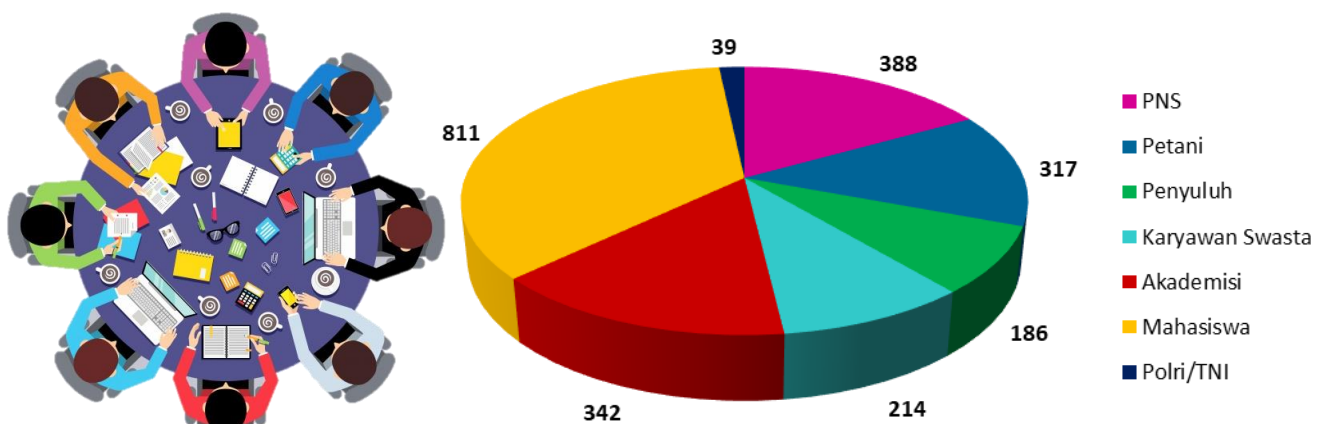
5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



Gambar 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Data

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pemohon informasi terbanyak berusia 37-41 tahun sebanyak 530 orang atau 23,79% dari pemohon informasi. Secara rinci pemohon berdasarkan usia meliputi : 17-21 tahun 422 orang, 42-46 tahun 412 orang, 27-31 tahun 363 orang, 22-26 tahun 271 orang, dan 32-36 tahun 230 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa data dan informasi BPPSDMP dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai usia.

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

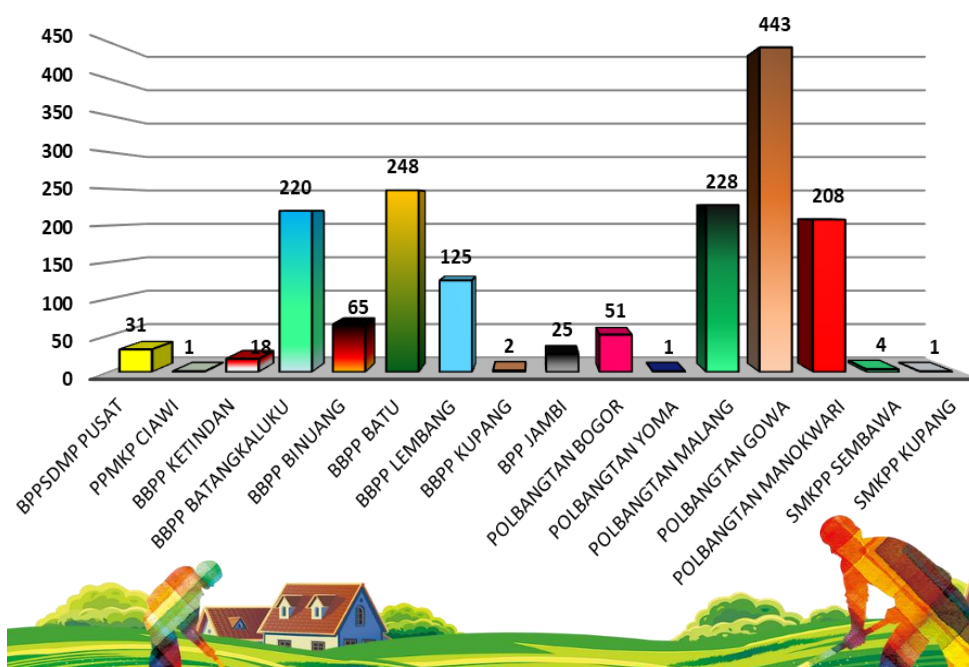


Gambar 4. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan

Pemohon informasi terhadap BPPSDMP sangat beragam, mulai dari kalangan TNI, Akademisi, PNS, sampai petani. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan jumlah pemohon berdasarkan jenis pekerjaan meliputi : Karyawan swasta (811 orang); Akademisi (342 orang); ASN PNS (338 orang); Petani (317 orang), Mahasiswa/i (214 orang), Penyuluh (186 orang), dan Polri/TNI (39 orang).

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi :

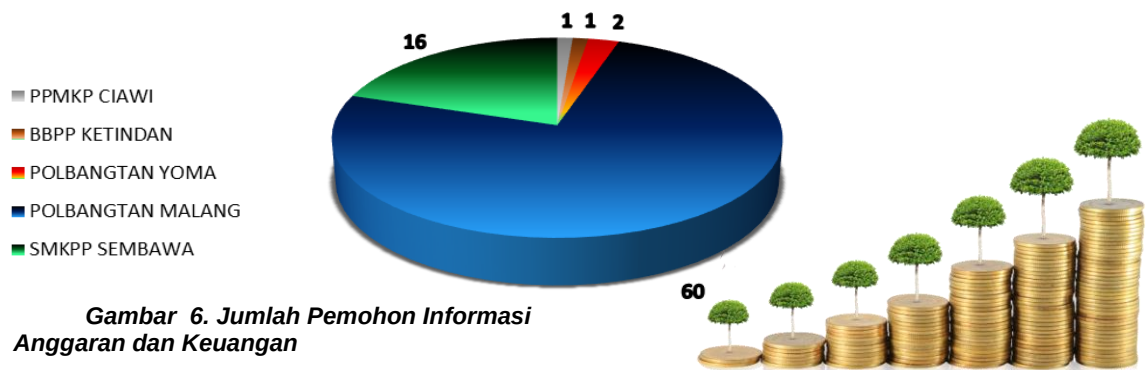
a. Informasi Agribisnis



Gambar 5. Jumlah Permohonan Informasi Agribisnis

Berdasarkan grafik di atas terdapat lima (5) permohonan informasi kelompok informasi agribisnis tertinggi yang diperoleh : Polbangtan Gowa (443 permohonan), BBPP Batu (248 permohonan), Polbangtan Malang (228 permohonan), BBPP Batangkaluku (220 p permohonan) dan Polbangtan Manokwari (208 permohonan). Informasi terkait tersebut diajukan oleh 1671 pemohon kepada PPID lingkup BPPSDMP baik Pusat maupun UPT. Sebanyak 14 UPT mendapat permohonan informasi agribisnis mencakup : pengembangan usaha agribisnis, kelompok tani agribisnis, pengolahan, pemasaran, dll.

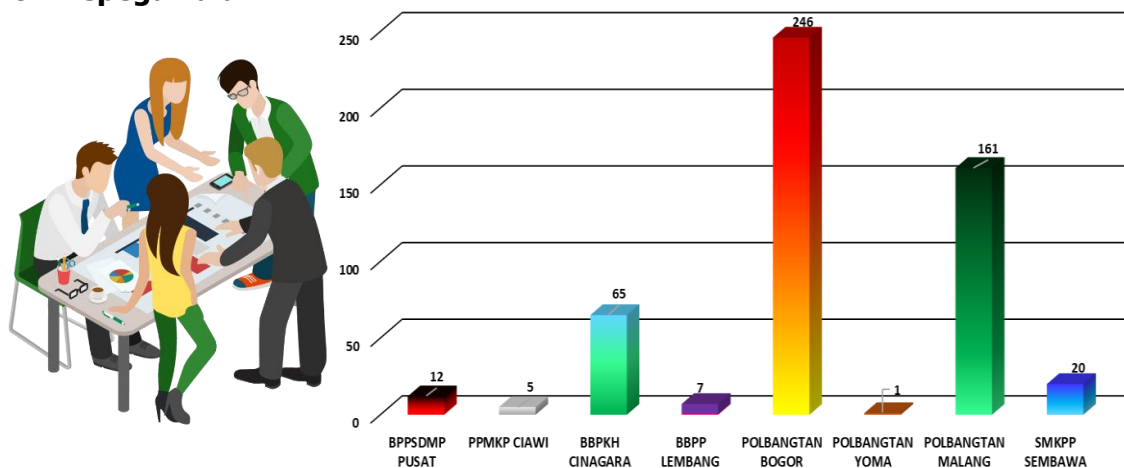
b. Anggaran dan Keuangan



Gambar 6. Jumlah Pemohon Informasi Anggaran dan Keuangan

PPID pembantu pelaksana/UPT mendapatkan 80 permohonan informasi terkait anggaran & keuangan. Berdasarkan grafik di atas jumlah pemohon berdasarkan kelompok anggaran dan keuangan tertinggi ditujukan kepada Polbangtan Malang sebanyak 60 permohonan. Sementara itu, SMKPP Sembawa, Polbangtan Yoma, BBPP Ketindan dan PPMKP Ciawi dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak dua permohonan.

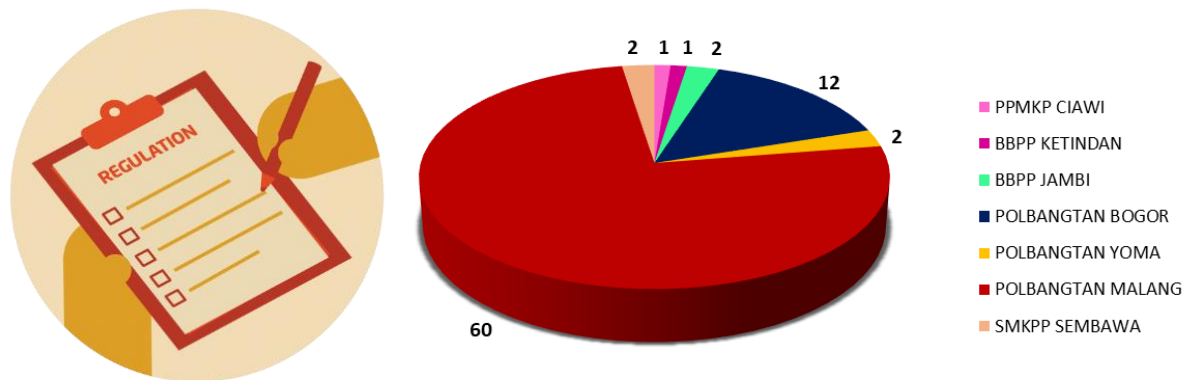
c. Kepegawaian



Gambar 7. Jumlah Pemohon Informasi Kepegawaian

PPID pembantu pelaksana/UPT mendapatkan 517 permohonan informasi terkait kepegawaian. Berdasarkan grafik di atas jumlah lima (5) permohonan tertinggi kelompok informasi kepegawaian diperoleh Polbangtan Bogor, Polbangtan Malang, BBPKH Cinagara, SMKPP Sembawa dan BPPSDMP.

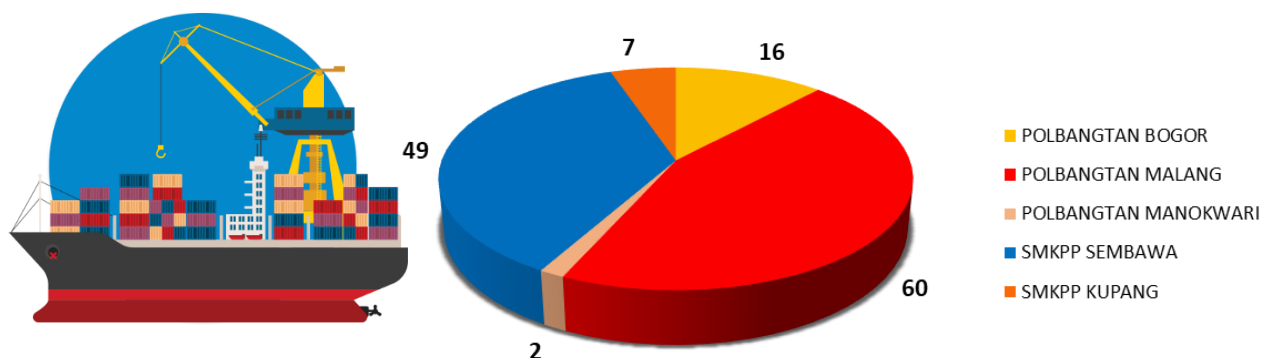
d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang



Gambar 8. Jumlah Pemohon Informasi Hukum dan Peraturan UU

PPID pembantu pelaksana/UPT mendapatkan 80 permohonan informasi terkait kategori hukum perundang-undangan. Berdasarkan grafik di atas jumlah permohonan informasi kategori ini diperoleh Polbangtan Malang (60 permohonan) dan Polbangtan Bogor (12 permohonan). Sedangkan SMKPP Sembawa, BBPP Jambi dan Polbangtan Yoma mendapatkan masing masing 2 permohonan.

e. Pengadaan Barang dan Jasa



Gambar 9. Jumlah Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

PPID pembantu pelaksana/UPT mendapatkan 134 permohonan informasi terkait kelompok pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan grafik di atas PPID pembantu pelaksana yang mendapat permohonan informasi pengadaan barang dan jasa: Polbangtan Malang (60 permohonan), SMK-PP Sembawa (49 permohonan), Polbangtan Bogor (16 permohonan), SMK-PP Kupang (7 permohonan), dan Polbangtan Manokwari (2 permohonan)

IV. PENUTUP

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat dapat mengakses informasi secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam memintan akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Keterbukaan Informasi sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2018 telah dilaksanakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dan evaluasi dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, inovasi dan kolaborasi serta pengelolaannya.

Pada Tahun 2021, PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Unit BPPSDMP telah menerima 2464 permohonan informasi dengan 2482 pertanyaan dimana 530 orang diantaranya rata-rata berusia 31-41 tahun dan mayoritas berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 811 orang. Sebanyak 2482 pertanyaan yang didominasi seputar informasi agribisnis sebanyak 1671 dengan rata-rata dapat selesai dalam kurun waktu 1-2 hari sebanyak 2.389 pertanyaan/kasus.

Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Unit BPPSDMP telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada layanan informasi secara efektif dan efisien dengan tidak ada biaya serta dengan cara sederhana kepada publik.

Pelayanan terhadap permohonan informasi publik, akan terus ditingkatkan secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas guna memenuhi kriteria selaku badan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

LAMPIRAN

FOTO – FOTO RUANGAN PPID BPPSDMP

Meja Layanan Informasi



Ruang Konsultasi Layanan Informasi



Rak Dokumen PPID



Layanan Perpustakaan BPPSDMP



Meja Baca dan Buku Tamu Perpustakaan



Taman Baca Anak

